

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era globalisasi menyebabkan banyaknya perubahan-perubahan, salah satunya dengan adanya pembangunan di bidang ekonomi. Begitu banyak perusahaan yang muncul dan berkembang di Indonesia. Setiap perusahaan dituntut memiliki kemampuan dalam mengelola perusahaan secara efektif dan efisien. Perusahaan yang dikelola dengan baik akan menumbuhkan keyakinan pihak-pihak lain yang berkepentingan dan memperoleh kepercayaan dari pasar. Martono dan Harjito, (2005) mengemukakan bahwa ada beberapa pendapat tentang tujuan perusahaan, yang pertama untuk mencapai keuntungan yang maksimal atau mendapat laba yang sebesar-besarnya, kedua adalah memakmurkan pemilik perusahaan atau para pemegang saham dan yang ketiga adalah memaksimalkan Nilai Perusahaan yang tercermin pada harga saham. Semua pendapat tentang tujuan perusahaan tersebut secara substansi tidak jauh berbeda. Perbedaannya adalah penekanan yang ingin dicapai oleh masing-masing perusahaan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

Semua perusahaan pada dasarnya melaksanakan berbagai kegiatan baik yang bersifat operasional maupun non operasional guna memperoleh keuntungan (*profit*). Namun perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*), tetapi juga memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*), dan kesejahteraan masyarakat (*people*). Suprana (2008) menyatakan bahwa bisnis adalah aktivitas yang mengambil keuntungan interaksi sosial, karena

itu harus dikembalikan ke masyarakat sebagai tanggung jawab sosial. Mengenai nilai perusahaan atau citra perusahaan, kita pasti telah mengetahui bahwa setiap perusahaan pasti berusaha untuk meningkatkan citranya baik itu di mata pemegang saham ataupun di mata masyarakat. Banyak hal yang dapat mendukung untuk meningkatkan nilai perusahaan, beberapa caranya adalah dengan menerapkan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan meningkatkan tata kelola perusahaan (Mardikanto, 2014).

Peningkatan Nilai Perusahaan yang tinggi juga merupakan tujuan jangka panjang yang seharusnya dicapai perusahaan. Nilai Perusahaan merupakan persepsi investor pada tingkat keberhasilan perusahaan yang dinilai dari peningkatan harga sahamnya. Harga saham yang meningkat merupakan sebuah prestasi yang dicapai perusahaan sesuai dengan tujuan yang diinginkan emiten. Semakin tinggi Nilai Perusahaan, maka semakin besar kemakmuran yang akan diterima oleh pemilik perusahaan dan semakin tinggi pula tingkat kepercayaan investor terhadap perusahaan (Husnan dan Pudjiastuti, 2015).

Nilai Perusahaan dalam perusahaan sektor industri pariwisata merupakan kunci utama dalam peningkatan harga saham perusahaan. Untuk itu diperlukan perhatian terhadap peningkatan kinerja perusahaan baik peningkatan internal dalam hal tata kelola perusahaan maupun peningkatan eksternal yang dipengaruhi oleh masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Hal ini secara otomatis akan meningkatkan Nilai Perusahaan sektor industri pariwisata sehingga para investor tertarik menanamkan sahamnya. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi investor dalam menanamkan modalnya yaitu pengungkapan CSR. Berikut tabel pengungkapan CSR pada Perusahaan Sektor Industri Pariwisata tahun 2015-2019:

Tabel 1. 1
Pengungkapan CSR Perusahaan Sektor Industri Pariwisata

No	Kode Perusahaan	Pengungkapan CSR (dalam rupiah)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	NASA	-	-	-	-	-
2	BAYU	-	-	-	-	-
3	BUVA	-	1.250.000.000	1.120.100.000	1.927.293.773	2.350.000.000
4	PDES	125.000.000	125.000.000	117.000.000	190.000.000	40.000.000
5	FAST	1.179.850.444	-	-	500.000.000	-
6	JGLE	-	-	-	-	-
7	GMCW	-	-	-	-	-
8	HOME	-	-	-	-	-
9	SHID	-	-	-	-	-
10	INPP	-	-	-	-	-
11	ICON	-	-	-	-	-
12	JHID	-	-	-	-	-
13	JSPT	386.300.000	112.400.000	112.400.000	-	-
14	MAPB	-	-	-	-	-
15	MABA	-	-	-	-	-
16	MAMI	-	-	-	-	-
17	KPIG	-	-	-	-	-
18	PANR	3.000.000.000	3.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	40.000.000
19	PGLI	-	-	-	-	-
20	PJAA	-	-	-	-	-
21	PTSP	-	-	-	-	-
22	PNSE	507.373.686	523.570.000	562.000.000	-	-
23	PSKT	25.000.000	35.000.000	61.000.000	41.630.900	40.331.700
24	MINA	-	-	-	-	-
25	HOTL	-	-	-	-	-

Sumber : www.idx.co.id

Tabel 1.1 menyatakan fenomena yang terjadi terhadap CSR lima tahun terakhir pada perusahaan sektor industri pariwisata yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019 yaitu terdapat peningkatan dan penurunan nominal anggaran atau dana untuk merealisasikan program CSR pada masing-masing perusahaan sektor industri pariwisata. Seiring dengan pesatnya perkembangan sektor dunia usaha sebagai akibat liberalisasi ekonomi, berbagai kalangan swasta, organisasi

masyarakat, dan dunia pendidikan berupaya merumuskan dan mempromosikan tanggung jawab sosial sektor usaha dalam hubungannya dengan masyarakat dan lingkungan. Berbagai tekanan pun muncul, mulai dari kepentingan untuk meningkatkan daya saing, tuntutan untuk menerapkan *corporate governance*, hingga kepentingan *stakeholder* yang makin meningkat. Oleh karena itu, dunia usaha perlu mencari pola-pola kemitraan (*partnership*) dengan seluruh *stakeholder* agar dapat berperan dalam pembangunan, sekaligus meningkatkan kinerjanya agar tetap bertahan dan bahkan berkembang menjadi perusahaan yang mampu bersaing. Upaya tersebut secara umum disebut sebagai *Corporate Social Responsibility*.

Pemikiran yang melandasi adanya *Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) ini adalah bahwa perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab kepada para pemegang saham (*shareholder*), tetapi juga memiliki tanggung jawab kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan (Rika dan Islahuddin, 2008). penelitian sebelumnya oleh Putra, dkk (2017), Endiana (2019), Reny dan Denies (2012), Felmania, dkk (2014), hasil penelitian menunjukkan bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan, sedangkan hasil penelitian berbeda dinyatakan oleh penelitian dari Ardimas dan Wardoyo (2014). Hasil penelitian menyatakan bahwa CSR tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Nilai Perusahaan.

Good Corporate Governance (GCG) juga dapat meningkatkan Nilai Perusahaan. *Good Corporate Governance* (GCG) terdiri dari unsur-unsur Direksi, Komisaris, Pemegang Saham dan Kepemilikan Manajerial yang diharapkan dapat terjalin hubungan mekanisme kerja, pembagian tugas, kewenangan dan tanggung

jawab yang harmonis, baik secara intern maupun ekstern sehingga dapat meningkatkan Nilai Perusahaan (Anggitasari, 2012). Unsur *Good Corporate Governance* yang pertama yaitu Dewan Direksi. Dewan Direksi dalam suatu perusahaan berperan sebagai *agent* atau pengelola perusahaan yang kedudukannya bertanggung jawab secara penuh atas kegiatan operasional perusahaan. Dewan direksi merupakan sekelompok direktur-direktur yang di ketahui oleh presiden direktur. Dewan direksi juga harus memberikan informasi kepada dewan komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh dewan komisaris (Effendi, 2016). Penelitian Sebelumnya oleh Muryati dan Suardikha (2014), Onasis dan Robin (2016), dan Rujiman, dkk (2019), hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan. Sedangkan penelitian oleh Siahaan (2013) menyatakan bahwa Dewan Direksi tidak mempengaruhi Nilai Perusahaan.

Good Corporate Governance disamping Dewan Direksi, Dewan komisaris juga termasuk dalam unsur *Good Corporate Governance*. Dimana Dewan Komisaris memiliki tugas yaitu mengawasi strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mengawasi terlaksananya akuntabilitas perusahaan. Dewan komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan. Penelitian Sebelumnya oleh Siahaan (2013), Raharja (2014), Muryati dan Suardikha (2014), Onasis dan Robin (2016), Suryaningsih, dkk (2018), hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan. Sedangkan penelitian Hendra, dkk (2019) menunjukkan hasil bahwa Dewan Komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap Nilai Perusahaan.

Menurut Bapepam melalui SE-03/PM/2000 dan Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta (BEJ) No. Kep-315/BEJ/06/2000 komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota, salah satu diantaranya merupakan komisaris independen yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan keuangan. Komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara professional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasan atas protes pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan (Effendi, 2016).

Penelitian Sebelumnya olehRaharja (2014), Onasis dan Robin (2016), Rujiman, dkk (2019), hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite Audit berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan. Sedangkan penelitian oleh Muryati dan Suardikha (2014) menyatakan hasil bahwa Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Nilai Perusahaan. Penelitian oleh Siahaan (2013) menyatakan hasil bahwa Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.

Selain Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit, unsur *Good Corporate Governance* yang dapat meningkatkan Nilai Perusahaan adalah Kepemilikan Manajerial, dimana Kepemilikan Manajerial merupakan jumlah persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yang aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan (direksi dan komisaris) atau seluruh modal dalam perusahaan. Salah satu cara untuk meminimalisir adanya konflik keagenan dalam

perusahaan adalah dengan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham perusahaan tersebut, yaitu dengan cara kepemilikan manajerial (*insider ownership*), sehingga selain menjadi pengelola perusahaan, manajemen juga berperan sebagai pemegang saham perusahaan tersebut. Kepemilikan manajerial adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan (Effendi, 2016).

Penelitian Sebelumnya oleh Raharja (2014), Muryati dan Suardikha (2014), Rivandi (2018) menunjukkan hasil bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Sedangkan Penelitian oleh Suryaningsih, dkk (2018) menunjukkan hasil bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Penelitian oleh Onasis dan Robin (2016), Tielung, dkk (2018) menunjukkan hasil bahwa Kepemilikan Manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap Nilai Perusahaan.

Menurut Elgorni (2009), Teori Keagenan (*agency theory*) merupakan bisnis perusahaan yang berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, teori sosiologi, dan teori organisasi, prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pemegang saham selaku *principal* dan manajemen selaku agen dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut "*Nexus of Contract*". Hubungan keagenan ini timbul ketika *principal* meminta agen melaksanakan beberapa kegiatan atau pekerjaan bagi kepentingan *principal* yang meliputi pendelegasian sebagian wewenang pengambilan keputusan.

Wewenang dan tanggung jawab agen maupun *principal* diatur dalam suatu kontrak kerja atas persetujuan bersama. Dengan demikian, terjadi pemisahan kepemilikan antara dua pihak dimana mereka akan membuat keputusan-keputusan sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. *Signaling Theory* membahas mengenai dorongan perusahaan untuk mengungkapkan informasi kepada pihak eksternal karena terjadi asimetri informasi antara manajemen dengan pihak eksternal. Oleh sebab itu, semua informasi perusahaan, baik itu informasi keuangan maupun non keuangan harus diungkapkan oleh perusahaan (Ika, 2015).

Menurut Undang Undang Pariwisata No 10 Tahun 2009, Sektor industri pariwisata merupakan kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Sektor Industri pariwisata termasuk dalam industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Sektor ini merupakan sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pembangunan ekonomi.

Berdasarkan adanya ketidakkonsistenan dalam penelitian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai seberapa besar pengaruh CSR, dewan direksi, dewan komisaris, komite audit dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan sektor industri pariwisata yang terdaftar di BEI periode 2015-2019. Dengan meneliti tentang “Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Industri Pariwisata Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada Sektor Industri Pariwisata yang terdaftar di BEI?
2. Apakah Dewan Direksi berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada Sektor Industri Pariwisata yang terdaftar di BEI?
3. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada Sektor Industri Pariwisata yang terdaftar di BEI?
4. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada Sektor Industri Pariwisata yang terdaftar di BEI?
5. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan pada Sektor Industri Pariwisata yang terdaftar di BEI?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap nilai perusahaan pada Sektor Industri Pariwisata yang terdaftar di BEI.
2. Untuk menguji pengaruh Dewan Direksi terhadap Nilai Perusahaan pada Sektor Industri Pariwisata yang terdaftar di BEI.
3. Untuk menguji pengaruh Dewan Komisaris terhadap Nilai Perusahaan pada Sektor Industri Pariwisata yang terdaftar di BEI.
4. Untuk menguji pengaruh Komite Audit terhadap Nilai Perusahaan pada Sektor Industri Pariwisata yang terdaftar di BEI.
5. Untuk menguji pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan pada Sektor Industri Pariwisata yang terdaftar di BEI.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat member manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, adapun manfaat yang diharapkan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk akademi dan menambah wawasan dalam rangka mengkaji dan mengembangkan pemikiran. Penelitian ini mampu memberikan masukan yang bermanfaat dan menjadi referensi yang berhubungan dengan Nilai Perusahaan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan Nilai Perusahaan dari internal dan eksternal perusahaan. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi peneliti yang berminat mengkaji Nilai Perusahaan.

a. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan gambaran faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi Nilai Perusahaan pada Sektor Industri Pariwisata yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Karena Sektor Pariwisata membutuhkan peningkatan dalam Nilai Perusahaan.

b. Bagi Dunia Akademi

Dapat memberikan informasi faktor - faktor yang mempengaruhi Nilai Perusahaan. Sebagai bahan masukan pada penelitian di masa mendatang untuk menjelaskan faktor – faktor yang mempengaruhi Nilai Perusahaan.

c. Bagi Objek Penelitian

Memberikan kontribusi terhadap perusahaan sektor industri pariwisata yang berkaitan dengan faktor – faktor yang mempengaruhi Nilai Perusahaan sehingga dapat meningkatkan Nilai Perusahaan.

d. Bagi Peneliti Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan atau pembandingan bagi penelitian lain yang penelitiannya sejenis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Signalling Theory menurut Brigham dan Huston (2011) isyarat atau signal adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan hal yang penting, karena pengaruhnya terhadap keputusan investasi pihak diluar perusahaan. Informasi tersebut penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu saat ini maupun masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup perusahaan dan bagaimana efeknya pada perusahaan.

Signaling theory menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak *eksternal*. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang dari pihak luar (investor dan kreditor). Kurangnya informasi bagi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah kepada perusahaan. Perusahaan dapat mengurangi asimetri informasi dengan

memberikan sinyal kepada pihak luar. Hubungan teori sinyal dengan penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan dan CSR dianggap sebagai sinyal bagi investor dalam menilai baik buruknya perusahaan, hal ini disebabkan karena tata kelola perusahaan dapat membawa pengaruh terhadap harga saham perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik dianggap sebagai sinyal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik di masa depan.

2.1.2 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency theory*) bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*.

Perbedaan kepentingan antara *principal* dengan *agent* dapat menimbulkan permasalahan yang dikenal dengan asimetri informasi. Adanya asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan dirinya sendiri, mengakibatkan *agent* memanfaatkan adanya asimetri informasi yang dimilikinya untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui *principal*. Akibat adanya informasi yang tidak seimbang (asimetri Informasi) ini dapat menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan karena adanya kesulitan *principal* memonitor dan

melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan *agent*. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan permasalahan tersebut adalah :

a. *Moral Hazard*

Yaitu permasalahan yang muncul jika *agent* tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.

b. *Adverse selection*

Yaitu suatu keadaan dimana *principal* tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh *agent* benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya.

Jensen dan Meckling (1976) membagi biaya keagenan ini menjadi *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual loss*. *Monitoring cost* adalah biaya yang timbul dan ditanggung oleh *principal* untuk monitor perilaku *agent*, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku *agent*. *Bonding cost* merupakan biaya yang ditanggung oleh *agent* untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa *agent* akan bertindak untuk kepentingan *principal*. Sedangkan *residual loss* merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran *principal* sebagai akibat dari perbedaan keputusan *agent* dan keputusan *principal*. *Residual loss* merupakan nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kemakmuran yang dialami oleh *principal* sebagai akibat dari perbedaan kepentingan atau nilai kerugian yang dialami *principal* akibat keputusan yang diambil oleh *agent*.

Menurut Elqorni (2009), Teori Keagenan (*agency theory*) merupakan bisnis perusahaan yang berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, teori sosiologi, dan teori organisasi, prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pemegang saham selaku principal dan manajemen selaku agen dalam bentuk kontrak kerja sama yang disebut "*Nexus of Contract*". Hubungan keagenan ini timbul ketika principal meminta agen melaksanakan beberapa kegiatan atau pekerjaan bagi kepentingan principal yang meliputi pendelegasian sebagian wewenang pengambilan keputusan. Wewenang dan tanggung jawab agen maupun principal diatur dalam suatu kontrak kerja atas persetujuan bersama. Dengan demikian, terjadi pemisahan kepemilikan antara dua pihak dimana mereka akan membuat keputusan-keputusan sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing.

2.1.3 Corporate Social Responsibility (CSR)

Dalam konteks pembangunan saat ini, keberhasilan sebuah perusahaan bukan lagi diukur dari keuntungan bisnis semata, melainkan juga dilihat dari sejauh mana kepedulian perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. *Corporate Social Responsibility* adalah salah satu bentuk komitmen terhadap aktivitas bisnis untuk bertindak etis, berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup karyawan dan masyarakat, (Wijayanti dan Samrotun, 2016).

Terdapat beberapa lembaga atau asosiasi bisnis mendefinisikan *CSR* sebagai berikut:

1. Perusahaan mengakui bahwa kemampuan mereka untuk terus menyediakan barang dan jasa serta menciptakan kekayaan keuangan akan tergantung pada penerimaan mereka kemasyarakat internasional yang semakin menganggap perlindungan hak asasi manusia sebagai syarat dari lisensi perusahaan untuk beroperasi (*Amnesty International Business Group (UK)* dalam Mardikanto (2014))
2. *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah cara perusahaan mengelola dan memperbaiki dampak sosial dan lingkungan untuk menghasilkan nilai bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan dengan berinovasi strategi, organisasi dan operasi (Mardikanto, 2014).

2.1.4 Pengungkapan CSR

Pada umumnya pengungkapan ada yang bersifat wajib (*mandatory*), yaitu pengungkapan informasi wajib dilakukan oleh perusahaan berdasarkan pada peraturan atau standar tertentu, dan ada yang bersifat sukarela (*voluntary*) yang merupakan pengungkapan informasi tambahan dari perusahaan. Salah satu bentuk pengungkapan secara sukarela yang dilakukan oleh perusahaan adalah pengungkapan *CSR* pada laporan tahunan perusahaan. Aktivitas *CSR* dapat diinformasikan dan dikomunikasikan oleh perusahaan kepada *stakeholder* melalui sebuah pengungkapan di dalam laporan. Laporan tersebut merupakan salah satu cara untuk melihat sampai seberapa jauh transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan kejujuran yang dimiliki oleh perusahaan (Wijayanti dan Samrotun, 2016).

Secara Internasional saat ini tercatat sejumlah inisiatif *code of conduct* implementasi *CSR*, salah satunya adalah *Global Reporting Initiatives (GRI)* yang juga telah berkembang di Indonesia. *GRI* adalah sebuah pedoman yang diperuntukan bagi perusahaan sebagai dasar pelaporan terkait ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatan bisnis mereka (pelaporan *CSR*) yang didirikan tahun 1997 di New York dan kini berpusat di Amsterdam. Pedoman *GRI* merupakan pedoman yang paling sering digunakan sebagai acuan dalam pelaporan aktivitas *CSR* saat ini. *GRI* menyediakan rangkaian indikator kinerja yang dapat digunakan oleh perusahaan sebagai pedoman bagi perusahaan yang ingin mempublikasikan aktivitas *CSR*.

2.1.5 Pengukuran Nilai Perusahaan

Banyak cara yang dapat digunakan menilai perusahaan, salah satunya dengan *Price to Book Value*. Rasio ini dapat memberikan indikasi bagi manajemen mengenai penilaian investor terhadap kinerja perusahaan. Menurut Husnan. S dan Pudjiastuti (2006) *Price to Book Value (PBV)* merupakan perbandingan antara harga saham dan nilai buku saham. Untuk perusahaan-perusahaan yang berjalan dengan baik, umumnya rasio ini mencapai diatas satu, yang menunjukkan bahwa nilai pasar saham lebih besar dari nilai bukunya. Sehingga dapat diketahui apakah tingkat harga sahamnya *overvalued* atau *undervalued* dari nilai buku.

Menurut Johan (2012), Terdapat beberapa aspek yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan, salah satunya dari aspek keuangan yaitu

Profitabilitas. Profitabilitas yang tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi para pemegang saham. Nilai PBV yang rendah dicerminkan melalui harga saham yang *undervalued*. Harga saham yang *overvalued* atau nilai PBV yang tinggi mencerminkan persepsi investor yang berlebihan terhadap perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio PBV semakin tinggi pula kesempatan perusahaan dinilai oleh para pemodal.

2.1.6 Good Corporate Governance

Menurut Sutedi, (2012) *Good Corporate Governance* dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh pihak perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Konsep *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan konsep yang sudah saatnya diimplementasikan dalam perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Konsep ini terdiri dari unsur-unsur direksi dan komisaris dapat terjalin hubungan dan mekanisme kerja, pembagian tugas, kewenangan dan tanggung jawab yang harmonis, baik secara internal maupun eksternal dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan demi kepentingan internal dan eksternal.

Good Corporate Governance merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan institusi yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik adalah tata kelola yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah untuk semua stakeholder serta dapat mendukung terciptanya persaingan yang sehat dan kondusif. Pentingnya GCG sebagai tata kelola perusahaan yang baik di Indonesia akan menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan (KNKG 2006).

Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen dan dewan direksi. Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab, khususnya implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik dan melindungi kepentingan pemegang saham. Inti dari kebijakan tata kelola perusahaan adalah agar pihak-pihak yang berperan dalam menjalankan perusahaan memahami dan menjalankan fungsi dan peran sesuai wewenang dan tanggung jawab. Pihak yang berperan meliputi pemegang saham, dewan komisaris, komite, direksi, pimpinan unit dan karyawan.

Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep *Good Corporate Governance*, yaitu pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan kewajiban perusahaan

untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan *stakeholder*.

Adapun Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip dalam *Good Corporate Governance* diharapkan menjadi pedoman untuk peningkatan nilai dan kelangsungan hidup perusahaan. Secara umum menurut Sukrisno dan Ardana (2011) terdapat lima prinsip dasar *Good Corporate Governance*, yaitu:

1. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip dimana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan (*financial statement*) yang dapat dipercaya, untuk itu diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban setiap organ sehingga pengelolaan berjalan efektif.

2. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip dimana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya.

3. Keterbukaan (*Transparency*)

Keterbukaan bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi.

4. Kewajaran (*Fairness*)

Seluruh pemangku kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari perusahaan.

5. Kemandirian (*Independence*)

Prinsip ini menuntut para pengelola perusahaan agar dapat bertindak secara mandiri, sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa ada tekanan-tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang berlaku.

Untuk mewujudkan terciptanya *Good Corporate Governance*, prinsip-prinsip tersebut harus dapat dicapai oleh perusahaan dengan adanya kerja sama yang baik dari berbagai pihak, baik di dalam maupun luar perusahaan sesuai dengan standard peraturan yang berlaku untuk dapat memberikan manfaat kepada kondisi keuangan perusahaan.

Keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* juga mempunyai prasyarat tersendiri. Menurut Daniri (2005) ada dua faktor yang memegang peranan, faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yaitu beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG. Diantaranya:

1. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supermasi hukum yang konsisten dan efektif.
2. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *Good Corporate Governance* dan *Clean Governance* menuju *Good Government Governance* yang sebenarnya.
3. Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat, yang dapat menjadi standar pelaksanaan GCG yang efektif dan professional.

Faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan, antara lain :

1. Terdapatnya budaya perusahaan (*Corporate Governance*) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
2. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.
3. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG.
4. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
5. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

UNMAS DENPASAR

2.1.7 Pihak Internal

1. Dewan Direksi

Dewan direksi adalah dewan yang bertugas mengawasi perusahaan dan memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Dewan direksi dalam perusahaan bertindak sebagai agen dalam perusahaan. Dewan direksi menjalankan kegiatan operasional perusahaan berdasarkan atas kewenangan yang diterima dari pemilik perusahaan.

Pedoman GCG yang dihasilkan KNKG merumuskan prinsip-prinsip penting dalam Dewan Direksi yang menjadi acuan dalam usaha bisnis di Indonesia (Emirzon, 2007). Fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut:

- a. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan.
- b. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer).
- c. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan.
- d. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.

2. Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur Perseroan Terbatas (PT). Dewan komisaris sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance* (KNKG, 2006)

Secara umum dewan komisaris merupakan wakil *shareholder* perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas yang memiliki fungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilakukan manajemen (direksi),

dan bertanggung jawab untuk menilai apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengelola dan mengembangkan perusahaan, serta menyelenggarakan pengendalian internal perusahaan. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, makin mudah untuk mengendalikan CEO dan semakin efektif dalam memonitor aktivitas manajemen.

3. Komite Audit

Tunggal (2008: 136), menjelaskan definisi Komite Audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atau proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan.

Berdasarkan keputusan ketua BAPEPAM - LK No: Kep-643/BL/2012 pengertian dari komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit sedikitnya terdiri tiga orang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik dan diketuai oleh komisaris independen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komite audit sebagai komite yang diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan

memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan demi terlaksananya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Berdasarkan keputusan ketua BAPEPAM - LK No: Kep-643/BL/2012 komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik.
- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik.
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
- d. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukkan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*.
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal.
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan

- publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko dibawah dewan komisaris.
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik.
 - h. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik.
 - i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik.

4. Kepemilikan Manajerial

Menurut Wahidah-wati (2002) Kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Direksi dan Komisaris). Manajemen akan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan usaha yang telah dilakukannya dalam melakukan pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan. Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer sekaligus pemegang saham perusahaan. Kepemilikan manajerial bisa diukur dari jumlah persentase saham yang dimiliki manajemen. Kepemilikan manajerial cukup kuat dalam melaksanakan *Good Corporate Governance*, karena berperan penting dalam penerapan good corporate governance dengan prinsip-prinsip yang sudah ada.

Faisal, (2004) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah presentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh direksi, manajer dan

dewan komisaris. Besarnya presentase yang dimiliki oleh direksi, manajer, dan dewan komisaris dapat dilihat dalam laporan keuangan yang ditunjukkan dengan besarnya presentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Semakin besar kepemilikan manajer perusahaan maka tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan dapat meningkat. Informasi mengenai besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer penting untuk dituangkan dalam catatan atas laporan keuangan sebagai informasi bagi pengguna laporan keuangan. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. (Ross et al, 2002)

Dengan adanya pemisah antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan konflik keagenan disebabkan principal dan agen memaksimalkan utilitasnya masing-masing. Teori keagenan menjelaskan adanya kemungkinan permasalahan yang timbul antara pemegang saham dan manajer akibat kecilnya saham kepemilikan oleh manajer. Hal tersebut menjadi penyebab tindakan oportunistik atau mementingkan dan menguntungkan diri sendiri yang dilakukan oleh manajer.

Adanya kepemilikan saham yang besar oleh pihak manajemen dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor. Semakin besar kepemilikan saham oleh manajer maka akan semakin mengurangi perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan kepentingan pribadi. Hal tersebut akan menyebabkan manajemen ikut serta dan aktif dalam

pengambilan keputusan yang tepat sesuai dengan kepentingan perusahaan dan berani menanggung resiko secara langsung apabila keputusannya salah. Dengan demikian, manajemen tidak akan mementingkan diri sendiri dan tidak bertindak secara sepihak yang dapat merugikan perusahaan dan pemegang saham lainnya.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Untuk memperkaya penelitian, terlebih dahulu peneliti melihat penelitian terdahulu yang sejenis. Berikut adalah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan :

Penelitian oleh Yunasih dan Wirakusuma (2010) yang berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Good Corporate Corvernance* sebagai Variabel Pemoderasi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, pengungkapan CSR mampu memoderasi hubungan ROA dan nilai perusahaan tetapi kepemilikan manajerial tidak mampu memoderasi. Hal ini disebabkan karena kepemilikan manajerial di Indonesia masih sangat kecil dan perusahaan cenderung mementingkan pihak dalam perusahaan.

Penelitian oleh Reny dan Denies (2012) berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2007-2010). Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa Pengungkapan CSR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan dengan variabel kontrol size, jenis industri, profitabilitas, dan leverage pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010. *Good Corporate Governance* dan pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010. Terdapat persamaan pengungkapan CSR sebagai variabel bebas dan nilai perusahaan sebagai variabel terikat, sedangkan terdapat perbedaan *Good Corporate Governance* dengan variabel kontrol size dan leverage tidak digunakan dalam penelitian ini.

Wardoyo dan Veronica (2013), tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), yang diukur dari jumlah dewan komisaris, independensi dewan komisaris, ukuran dewan direksi, dan jumlah anggota komite audit, *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan kinerja perusahaan (ROA dan ROE) terhadap nilai perusahaan. Objek penelitian adalah seluruh perusahaan perbankan *go public* yang berjumlah 29 bank. Berdasarkan kelengkapan data hanya 24 bank yang menjadi sampel dengan periode pengamatan 2008-2010. Variabel independen adalah *Good Corporate Governance (GCG)*, CSR dan kinerja perusahaan. Variabel dependen adalah nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q. Analisis data yang digunakan terdiri dari analisis korelasi, determinasi, uji t, uji f, dan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi, ROA dan ROE memiliki pengaruh secara signifikan terhadap nilai

perusahaan, sedangkan ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, jumlah anggota komite audit dan CSR tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.

Penelitian oleh Putra dan Wirawati (2013) mengenai “Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Hubungan Antara Kinerja dengan Nilai Perusahaan”. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, kepemilikan manajerial mampu mempengaruhi hubungan antara kinerja dengan nilai perusahaan. Dalam hal ini kepemilikan manajerial memperkuat hubungan antara kinerja dengan nilai perusahaan. Terdapat persamaan kepemilikan manajerial sebagai variabel bebas dan nilai perusahaan sebagai variabel terikat, sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah kinerja tidak digunakan dalam penelitian.

Martantina (2014) yang berjudul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap Nilai Perusahaan dengan dimoderasi oleh *Good Corporate Governance (GCG)* pada perusahaan yang terdaftar di BEI. Hasilnya menggunakan regresi interaksi menunjukkan bahwa Tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara Manajemen variabel kepemilikan, dewan direksi, komite audit dan Dewan direksi sebagai proksi untuk tata kelola perusahaan yang baik tidak berhasil Moderat pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan terhadap nilai perusahaan.

Penelitian Muliani, dkk(2014) yang berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Pengungkapan *Corporate*

Social Responsibility dan *Good Corporate Governance* sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan secara positif, *corporate social responsibility* mampu memoderasi kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan secara positif dan *good corporate governance* mampu memoderasi kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan ke arah negatif. Terdapat persamaan pengungkapan CSR sebagai variabel bebas dan nilai perusahaan sebagai variabel terikat, dan terdapat perbedaan kinerja keuangan dan GCG tidak digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian Ardimas dan Wardoyo,(2014) yang berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan Pada Bank Go Public yang terdaftar di BEI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *corporate social responsibility* (CSR), dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Obyek penelitian adalah seluruh perusahaan perbankan go public yang berjumlah 29 bank, namun berdasarkan kelengkapan data maka hanya 22 bank yang menjadi sampel dengan periode pengamatan 2008 – 2010. Variabel independen adalah kinerja perusahaan (return on assets, return on equity, Operating Profit Margin, Net Profit Margin), dan Corporate Social Responsibility, sedangkan variabel dependennya nilai perusahaan (Price Book Value). Analisis data yang digunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROA dan ROE memiliki pengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan

OPM, NPM, dan CSR tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.

Penelitian oleh Felmania, dkk (2014) berjudul “*Good Corporate Governance Mechanism, Corporate Social Responsibility Disclosure on Firm Value, Empirical Study on Listed Company in Indonesia Stock Exchange*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit dan Pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2011 yang melakukan *eksposur* dan melaporkan aktivitas CSR mereka. Sampel terdiri dari 33 perusahaan yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*.

Penelitian oleh Kristie Onasis dan Robin (2016) berjudul “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di BEI”. Penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan, umur perusahaan, leverage dan ROA sebagai variabel kontrol. Menggunakan metode *purposive sampling*, objek penelitian ini merupakan perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode penelitian dari tahun 2009 sampai dengan 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif antara ukuran dewan direksi, dewan independen, komite audit, rapat komite audit, leverage, dan ROA terhadap nilai perusahaan. Sedangkan pada variabel ukuran perusahaan dan umur perusahaan ditemukan pengaruh signifikan

negatif terhadap nilai perusahaan. Selain itu, ditemukan bahwa kepemilikan asing dan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.

Permatasari dan Gayatri (2016), penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui peranan profitabilitas dalam hubungan *Good Corporate Governance (GCG)* dan nilai perusahaan. Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, total sampel yakni 85 pengamatan selama lima tahun penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi non partisipan. Teknik analisis yang digunakan adalah *moderated regression analysis*.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa profitabilitas mampu memoderasi pengaruh *Good Corporate Governance (GCG)* pada nilai perusahaan. Semakin tinggi skor *Good Corporate Governance (GCG)* maka semakin tinggi nilai perusahaan, terutama bagi perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi. Keberadaan profitabilitas akan memperkuat pengaruh positif antara *Good Corporate Governance (GCG)* dan nilai perusahaan.

Penelitian oleh Dewi (2016), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, dewan direksi independen, *debt to asset ratio (DAR)* dan *debt to equity ratio (DER)* terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan tahunan perusahaan. Sampel dalam penelitian ini adalah

perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode studi dari tahun 2010 hingga 2014. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan SPSS versi 22. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, kepemilikan institusional, komite audit, dewan independen, dan *debt to equity ratio* (DER) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan rasio kepemilikan institusional, rasio hutang terhadap aset (DAR) berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Sumartini (2016) berjudul “Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Hubungan Kinerja Dengan Nilai Perusahaan” Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan kinerja keuangan dengan nilai perusahaan. Terdapat persamaan kepemilikan manajerial sebagai variabel bebas, nilai perusahaan sebagai variabel terikat, sedangkan perbedaan pada penelitian adalah kinerja keuangan dan kepemilikan institusional tidak digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian oleh Pamungkas (2016) berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan dengan *Good Corporate Governance* dan Pengungkapan CSR sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Syariah Periode 2012-2014”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan,

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak mampu memoderasi hubungan antara ROA terhadap nilai perusahaan, pengungkapan CSR mampu memoderasi hubungan antara ROA terhadap nilai perusahaan secara positif. Terdapat persamaan kepemilikan manajerial dan pengungkapan CSR sebagai variabel bebas serta nilai perusahaan sebagai variabel terikat, sedangkan terdapat perbedaan kinerja keuangan dan kepemilikan institusional tidak digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian oleh Depari (2016) berjudul “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dan *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Sebagai Variabel Mediating (Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2014)” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mekanisme *Good Corporate Governance* kepemilikan saham manajerial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap CSR, kinerja perusahaan yang diprosikan dengan ROA tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap CSR, pengungkapan CSR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja perusahaan ROA, mekanisme *Good Corporate Governance* kepemilikan saham manajerial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap nilai perusahaan, kinerja perusahaan ROA memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab social CSR memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Selain itu, CSR tidak dapat memediasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap nilai

perusahaan dan CSR tidak dapat memediasi pengaruh variabel ROA terhadap nilai perusahaan. Terdapat persamaan pengungkapan CSR dan kepemilikan manajerial sebagai variabel bebas serta nilai perusahaan sebagai variabel terikat, sedangkan terdapat perbedaan kinerja perusahaan dan ROA tidak digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra, dkk (2017) berjudul “Pengaruh Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014 - 2015”. Metode pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling*, sumber data merupakan data sekunder yang diperoleh dari BEI periode 2014-2016. Analisis data penelitian ini menggunakan *Path Analysis*, dengan bantuan program *Partial Last Square* agar tidak terjadi banyak asumsi dan didapatkan hasil yang pasti. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa Profitabilitas, *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan. Profitabilitas tidak mampu menjadi variabel mediasi yang mempengaruhi hubungan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan. Terdapat persamaan GCG dan CSR sebagai variabel bebas, nilai perusahaan sebagai variabel terikat, sedangkan perbedaan pada penelitian adalah profitabilitas tidak digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Edwitya (2017) mengenai “Pengaruh Kinerja Keuangan dan *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2015”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *debt to equity ratio* yang merupakan proksi dari rasio *leverage* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Proporsi dewan komisaris independen dan ukuran komite audit yang merupakan proksi *Good Corporate Governance* juga menunjukkan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan sedangkan kepemilikan manajerial yang merupakan proksi dari *Good Corporate Governance* tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Terdapat persamaan ukuran komite audit dan kepemilikan manajerial sebagai variabel bebas serta nilai perusahaan sebagai variabel terikat, sedangkan perbedaan penelitian ini adalah *debt to equity ratio* dan proporsi dewan komisaris independen tidak digunakan dalam penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri & Budiyanto (2018) mengenai “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Manajerial sebagai Variabel Moderating”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Nilai Perusahaan dengan kepemilikan manajerial sebagai variabel moderating (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia). Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2016. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sampling jenuh dan sampel yang digunakan berjumlah 24 perusahaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dengan menggunakan data laporan tahunan selama periode 2013-2016. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa

Corporate Social Responsibility berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan. Sementara itu, kepemilikan manajerial berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan kepemilikan manajerial tidak dapat memoderasi pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap nilai perusahaan.

Penelitian oleh Rivandi (2018) berjudul “Pengaruh *Intellectual Capital Disclosure*, Kinerja Keuangan dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh modal intelektual, kinerja keuangan, dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Sampel penelitian ini berjumlah 30 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Berdasarkan hipotesis Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan, sedangkan Variabel Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.

Penelitian oleh Widiastuti (2018) yang berjudul “Pengaruh *Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, kepemilikan manajemen berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Kepemilikan konstitusional berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Penelitian oleh Endiana (2019) mengenai “Implementasi *Corporate Governance* Pada *Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan”. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan LQ45 yang terdaftar di BEI. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 36 perusahaan dengan metode purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah PLS Moderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Tata Kelola Perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap nilai perusahaan. Terdapat persamaan GCG dan CSR sebagai variabel bebas dan nilai perusahaan sebagai variabel terikat.

Adapun rangkuman penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel

2.1 Lampiran 1

